

# PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh)

Mislinawati,<sup>1\*</sup>, Dini Attar<sup>2</sup>, Muhammad Ikhsan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh  
Email: mislina\_wati@yahoo.com<sup>1\*</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of human resources and organizational commitment to the application of accrual-based government accounting standards at the Banda Aceh City Financial Management Agency. This research was conducted using quantitative methods. The population in this study were all employees of the Banda Aceh City Financial Management Agency. The type of sampling is purposive sampling. Data were collected by distributing questionnaires directly to respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of the Statistical Package for Social Science (SPSS) application. The conclusion of this study is that human resource variables have no and insignificant effect on the application of accrual-based government accounting standards. The organizational commitment variable has a significant and significant effect on the application of accrual-based government accounting standards, while simultaneously the two variables have an effect and are significant on the application of accrual-based government accounting standards.*

*Keywords: Human Resources, Organizational Commitment, Implementation of Accrual-based Government Accounting Standards.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai Badan Pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh. Jenis penentuan sampel adalah dengan cara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan secara simultan kedua variabel berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

*Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.*

## PENDAHULUAN

Dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di bidang pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan membuat kebijakan akuntansi pemerintah yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 yang bertujuan untuk melakukan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 yang menggunakan berbasis kas menuju akrual.

Standar akuntansi pemerintah adalah salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara serta pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabilitas

maupun transparansi. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam penggunaan standar akuntansi pemerintah diantaranya pengguna laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesi akuntansi, akademisi serta pemerintah. Dilakukan pada standar akuntansi pemerintahan tersebut untuk memperbaiki tata kelola keuangan pada organisasi pemerintahan.

Peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk pada Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh menerapkan standar akuntansi pemerintah yang diatur pada Peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dengan menerapkan pencatatan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Peneliti melakukan observasi awal dengan mendapatkan hasil yaitu Penerapan akuntansi kas menuju akrual dilakukan sebagai proses penyesuaian terhadap perubahan sistem pencatatan akuntansi yang dulunya menggunakan sistem berbasis kas dan menggunakan pencatatan akuntansi pemerintah full akrual pada tahun 2018. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah Kota Banda Aceh dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam proses penerapan akuntansi berbasis akrual dalam ruang lingkup pemerintahan terdapat beberapa kendala, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Aldiani (2010) menyebutkan sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, dukungan yang kuat dari pemimpin merupakan kunci keberhasilan dari perubahan. Penyebab lemahnya penyusunan Laporan keuangan pada pemerintah/lembaga adalah lemahnya komitmen pemimpin satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penerima Pelimpahan wewenang/Tugas Pembantu. Dalam laman [bandaacehkota.go.id](http://bandaacehkota.go.id) (2018), beberapa tahun ke belakang Kota Banda Aceh berhasil membuktikan komitmennya dalam melakukan reformasi dibidang keuangan, hal itu tercermin dari prestasi yang berhasil diraih oleh Kota Banda Aceh di bidang keuangan pemerintahan diantaranya:

1. Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.
2. Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - RI.
3. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut - turut selama 10 kali sejak 2008 - 2017 didapat dari Kemenkeu RI.

Dalam laman [Bandaaceh.bpk.go.id](http://Bandaaceh.bpk.go.id) (2019) Kota Banda Aceh kembali melaporkan Laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018. Banda Aceh membuktikan keberhasilannya mampu mempertahankan Opini WTP sejak tahun anggaran 2008 atau sebelas kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang terjadi di pemerintah Kota Banda Aceh. Marjulin (2010)

menyebutkan bahwa dari 22 (dua puluh dua) item pengungkapan, Kota Banda Aceh untuk dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan mengungkapkan 11 (sebelas) item pengungkapan yaitu mengenai entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran, pengakuan pendapatan dan pengakuan belanja, pembentukan dana cadangan serta informasi lainnya. Artinya pengungkapan untuk dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan terpenuhi 50%. Artinya kualitas pengungkapan kurang baik, karena banyak dari item pengungkapan yang tidak diungkapkan, seperti prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian Investasi, Kontrak-kontrak konstruksi, Biaya penelitian dan pengembangan, dan lainnya. Jika dilihat dari presentase pengungkapan laporan keuangan Kota Banda Aceh mengungkapkan sebesar 65%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Kota Banda Aceh masih belum sempurna, tetapi karena tidak adanya pedoman ukuran untuk kualitas pengungkapan, maka laporan keuangan dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh menjadi objek pada penelitian ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) tempat dimana mengelola keuangan dan aset daerah di Kota Banda Aceh

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Sumber Daya Manusia**

Priyono dan Marnis (2008) Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dari pendapat tersebut dapat didefinisikan sumber daya manusia yaitu harus memiliki pola pikir dan fisik ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi dalam bekerja dimotivasi oleh keinginan sumber daya manusia tersebut.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi yaitu suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas dan tercapainya visi, misi serta tujuan organisasi. Seseorang bisa disebut mempunyai komitmen yang tinggi kepada organisasi, bisa diketahui dengan melihat ciri-ciri diantaranya kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan individu yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta setia memelihara keanggotaan. Robbin (2008) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi karyawan suatu keadaan individu yang mempunyai sifat organisasi, tujuan dan ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu individu yang mau bekerja keras untuk organisasi, tujuan dan nilai-nilai tertentu dan juga ingin mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi.

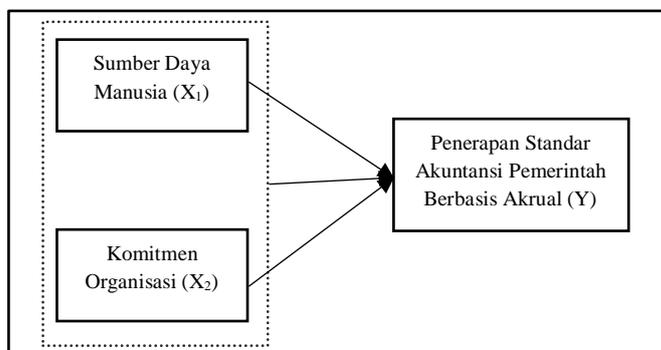
## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual harus dilakukan secara transparan dan mengacu pada standar akuntansi berbasis akrual yang dapat diperbandingkan secara internasional. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 PP No. 71 tahun 2010 yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual merupakan suatu keharusan dan harus dilaksanakan terutama untuk pengakuan pendapatan dan belanja.

Meskipun penerapan standar akuntansi pemerintahan tidaklah mudah, menurut Asian Development Bank atau ADB Athukorala (2003) memberikan tujuh rekomendasi penerapan basis akrual bagi negara berkembang diantaranya:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual.
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting.
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan.
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal.
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai.
6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat.
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

## Kerangka Konseptual



## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Adapun pemilihan objek penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl Tgk. Abu Lam U No. 07 Banda Aceh Telp. 0651 - 7412306. Pemilihan objek penelitian tersebut berdasarkan observasi awal peneliti terkait sebaran informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang ada pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Menurut Priyono (2016:43) kuesioner merupakan lembaran yang berisikan beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku, dalam pelaksanaannya kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Radjab & Jam'an (2017:110) data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus menggumpulkannya secara langsung dengan cara melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner kepada responden.

### **Pengujian Instrumen Penelitian**

#### **Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan komponen yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali (2016) dengan demikian, validitas dapat mengukur apakah pertanyaan di dalam kuesioner yang sudah di buat dapat mengukur apa yang akan diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan pearson Correlation. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table maka butir atau pertanyaan atau indicator tersebut dinyatakan valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Menurut Ghazali (2016) mendefinisikan reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten atau stabil dari masa ke masa. Pengukuran ini hanya dilakukan sekali (one shoot) kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban dan pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Dikatakan reliable suatu variabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ .

#### **Uji Asumsi Klasik**

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

#### **Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghazali (2016) Uji multikolinieritas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Apabila ini terjadi korelasi, maka terdapat problem multikoolinearitas.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Dari uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dan ke pengamatan lain.

#### **Uji Normalitas**

Tujuan menguji normalitas adalah untuk mengetahui normalitas variabel pengganggu (residual). Regresi normal klasik mengasumsi bahwa  $\mu$  (residual) didistribusikan secara normal. Residual variabel yang didistribusikan secara normal biasanya terletak di sekitar garis horizontal (tidak jauh dari garis diagonal).

## Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Variabel independen terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi. Sedangkan variabel dependen adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

- Uji Statistik F

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

- Uji Statistik t

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05.

- Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1, nilai  $R^2$  yang semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin lemah

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. mayoritas jenis kelamin perempuan, mayoritas usia 30-40 tahun, mayoritas lama bekerja 10-20 tahun, dengan mayoritas pendidikan DII/DIII/DIV/S1 (Sarjana).

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ), variabel pengaruh Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI memiliki nilai F hitung 24.424 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang di bawah alpha 0,05. Hal ini menunjukkan diterima  $H_{a1}$  atau  $H_{01}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama memberikan pengaruh dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

### **Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ), variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai t hitung 1,646 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0108 yang di atas alpha 0,05. Hal ini menunjukkan diterima  $H_{02}$  atau  $H_{a2}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia tidak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

### **Pengaruh Perspektif Pelanggan terhadap Kinerja Karyawan.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ), variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai  $t$  hitung 3,219 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,002 yang di bawah  $\alpha$  0,05. Hal ini menunjukkan diterima  $H_{a3}$  atau  $H_{03}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan Komitmen Organisasi memberikan pengaruh dan signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,550 hal ini berarti 55% variasi variabel dependen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi. Dari dua variabel independen tersebut memiliki kontribusi masukan yang besar ke variabel dependen, sedangkan sisanya ( $100\% - 55\% = 45\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan ; Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL, Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaL, dan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaL.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh; Meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaL kepada pegawai yang terlibat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaL dengan memberikan pelatihan-pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaL secara intensif dan berkala, dan diharapkan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Kota Banda Aceh harus memulai diskusi untuk membahas langkah - langkah yang akan ditempuh dalam mengatasi kendala yang akan dihadapi pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaL.

Bagi peneliti selanjutnya ; diharapkan dapat memperluas daerah survei tidak hanya di badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh namun dapat dilakukan di instansi - instansi lainnya dengan menggunakan variabel - variabel yang baru seperti, pemanfaatan teknologi dan tingkat pendidikan, dan Penelitian dapat disertai dengan metode wawancara atau terlibat langsung dengan tatap muka dengan responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar responden lebih memahami pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.

## REFERENSI

- Aceh, P. P. (n.d.). *Pemerintah Kota Banda Aceh*. Retrieved from <https://bandaacehkota.go.id/p/prestasi.html>
- Adam, H. (2015). *Accounting Principle*. Universitas Kebangsaan.
- Aldiani, S. (2010). Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi* 12.
- Athukorala, S. (2003). (*Financial Management Specialist Asian Development Bank*) and Barry Reid (*Consultant*). Retrieved from Asian Development Bank (ADB) Publication, Regional and Sustainable Development Department Governance and Regional Cooperation Division: <https://www.adb.org/>
- Banda Aceh, P. (n.d.). Retrieved from [Bandaacehkota.go.id](http://Bandaacehkota.go.id)
- Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Akrua: Kajian dari aspek Keperilakuan. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hans Kartikahadi., d. (2016). *Akutansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harbani, P. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Iznillah, M. L. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pads Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *jom FEKON Vol. 2 No. 2*.
- Kieso, D. E. (2011). *Intermediate Accounting IFRS Edition Volume Pertama*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Madjid, F. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros). *Departemen Akuntansi*.
- Manullang, M. (2009). *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit : Gadjah Mada University Press.
- Marjulin. (2010). ANALISA PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN. *Politeknik Negeri Lhokseumawe*.
- Mulyono, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(1), 17-34*.
- Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. (n.d.).
- permatasari S, N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh). 1-15.
- priyono, & marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama.
- Priyono, D. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Purwaningrum, I. (2017). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Skripsi*.

- Radjab, E. D., & Jam'an, A. D. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Robbin, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Robbin, S. P., & Judge, T. A. (n.d.). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Safitri, D. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Vol 5, No. 2*, 174-189.
- Sedarmayanti, M. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Solihin, A. (2015). Pengaruh Motivasi kerja dan kompetensi pedagogik terhadap kinerja . *Jom Fekom* , 1.
- widyastuti, S. I. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Karua Di Kabupaten Gianyar. *E-Journal*, 3(1), 1-12.
- .